

**ANALISA PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS
SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA DI BANK SYARIAH
MANDIRI CABANG HARAPAN RAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)**



OLEH :

**ALHAFIZ
NIM. 10425025122**

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2011

ABSTRAK

Manusia dapat melakukan apa saja termasuk kegiatan ekonomi, akan tetapi semuanya itu akan selalu dalam pengawasan Allah secara langsung dan bersifat melekat, pengawasan Rasulullah yang dalam bentuk pengawasan oleh penguasa dan pengawasan umum yang dilakukan oleh umat Islam. Pengawasan masyarakat dapat diwujudkan secara langsung atau melalui aturan-aturan yang mengatur dan membatasi. Begitu juga pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawasan Syariah terhadap lembaga keuangan Syariah tentu punya keterbatasan baik dari segi waktu, kemampuan fisik dan penerapan sistem pengawasan yang baik. permasalahan ini tampak pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Harapan Raya dimana DPS pada lembaga keuangan ini hanya tiga orang sahaja, sementara Bank Syariah Mandiri tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di Bank Mandiri Syariah kantor cabang Harapan Raya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan didukung dengan teori yang ada, peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya dilakukan dengan baik dimana dalam pelaksanaan tugas DPS telah menilai kesesuaian konsep syariah pada BSM CABANG Harapan Raya, melakukan penilaian, pelaporan tentang operasional dan praktek Bank Syariah Mandiri sementara Implementasi tugas dewan

pengawas syariah dibuktikan dengan kesesuaian operasional terhadap fatwa DSN, mematuhi fatwa DSN, semua Acuan pengawasan sesuai dengan konsep DSN , dan DPS telah melakukan bimbing, penyuluhan dan pelatihan kepada semua pelaku BSM .

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
PENGESAHAN PEMIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PT . BANK SYARIAH MANDIRI	
A. Sejarah Dan Perkembangan Bank Syariah Mandiri.....	16
B. Dasar Hukum Pendirian Bank Syariah Mandiri.....	18
C. Visi, Misi dan Budaya Kerja Bank syariah Mandiri.....	19
D. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri.....	21
E. Bentuk-bentuk Produk bank Syariah Cabang Harapan Raya.....	21
F. Struktur Organisasi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya.....	24

BAB III	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN IMPLEMENTASI TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
	A. Pengertian Dewan Pengawas Syariah.....	28
	B. Tugas Dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah.....	29
	C. Implementasi Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah.....	31
	1. Sistem Operasional Perbankan Syariah.....	32
	2. Prinsip-prinsip Dasar Dari Produk-produk Perbankan Syariah.....	33
BAB IV	PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN IMPLEMENTASI TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
	A. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah.....	41
	B. Implementasi Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah.....	48
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar II. 2.1. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri.....	21
Gambar II. 2.2. Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri Cabang Pembantu Harapan Raya	24

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel I. 4.1. Pernyataan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya.....	44
Tabel I. 4.2 . Pernyataan Responden Mengenai Impelemntasi Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya	45
Tabel I. 4.3 . Pernyataan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dalam Memberikan Opini Mengenai Aspek Syariah Terhadap Pelaksanaan Operasional dan Laporan Publikasi Konsep Syariah	46
Tabel I. 4.4 . Pernyataan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dalam Memberikan Opini Mengenai Aspek Syariah Terhadap Pelaksanaan Operasional dan Laporan Publikasi Konsep Syariah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya.....	47
Tabel I. 4.5 . Pernyataan Responden Mengenai Pengawas dan Kepastian Kesesuaian Kegiatan Operasional Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Yang Dilakukan Oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya.....	50
Tabel I. 4.6 . Pernyataan Responden Mengenai Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah Mandiri Terhadap Fatwa Yng di Keluarkan Oleh Dewan Syariah Nasional.....	51
Tabel I. 4.7 . Pernyataan Responden Mengenai Produk dan Konsep Operasional yang di Awasi Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya.....	52
Tabel I. 4.8 . Pernyataan Responden Mengenai Acuan Pengawasan Terhadap Konsep Operasional dan Produk Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya.....	53
Tabel I. 4.9 . Pernyataan Responden Mengenai Pembimbingan, Penyuluhan dan Pelatihan Yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah Kepada Karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya...	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syari'ah adalah suatu sistem yang secara alami dibutuhkan oleh dan dari lembaga keuangan. Fitrah lembaga keuangan yang asli yaitu menjadi lembaga intermediasi atau lembaga penghubung pemilik modal yang membutuhkan tambahan modal atau dana untuk kegiatan usahanya. Jadi untuk itu, lembaga keuangan harus mencari kegiatan usaha yang halal untuk dibiayai, harus berlaku amanah dengan menghindari kondisi yang gharar dan menjauhi yang maysir, serta harus lebih mendekatkan nasabah pemilik dana dengan nasabah pemilik usaha.

Bank Syari'ah muncul di Indonesia pada sekitar tahun 90 -an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil (Syariah)¹. Dalam Undang-Undang tersebut di atur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan memberi pelang perbankan menjalankan Dual Banking System², yaitu bank konvensional dapat menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah dengan cara membuka divisi atau unit layanan syariah. Perkembangan Bank Syariah cukup pesat, dimulai dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri yang merupakan anak Perusahaan Bank Mandiri dengan badan hukum terpisah dan

¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 26

² Bank-bank Konvensional yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu dengan cara membuka divisi atau unit Syari'ah

cabang Bank Syariah di bawah Bank Konvensional Bank-bank Konvensional yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu dengan cara membuka divisi atau unit Syariah seperti BNI Syariah, Bank IFI Syariah, BSM Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin, BII dan HSBC.

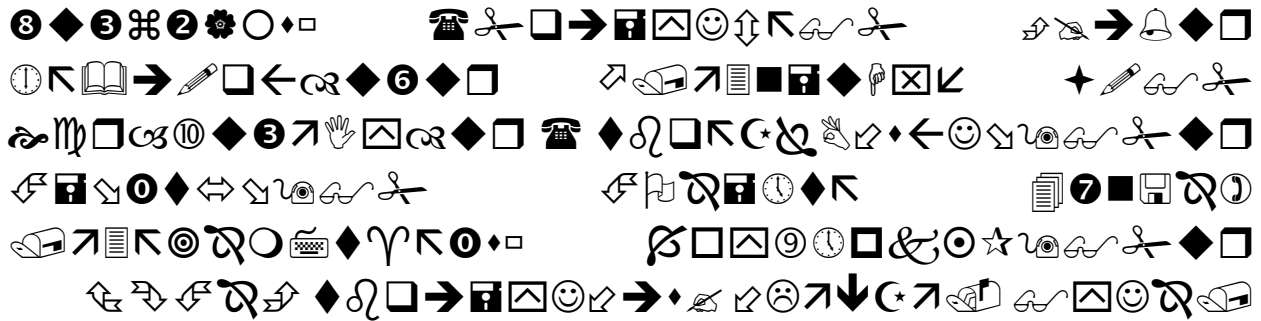
Kalau dilihat trend perkembangan perbankan syariah di Indonesia terlihat begitu pesat. Hal ini bisa dilihat dalam lima tahun terakhir jumlah bank syaria'h. tahun 2000 hanya ada lima bank (dua bank umum Syariah dan tiga unit usaha Syariah) namun pada akhir tahun 2005 menjadi 22 bank (tiga bank umum syari'ah dan 19 unit usaha syari'ah), perkembangan jumlah kantor cabang dan Cabang yang ditahun 2005 hanya 294 kantor, tahun 2006 menjadi 630 kantor³. Pertumbuhan perbankan syariah terus meningkat pada tahun 2011 bank syariah menjadi 970 kantor⁴. Salah satunya adalah kantor bank Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya yang terletak di jalan Imam Munandar menjalankan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan system dual banking.

Namun hal yang paling signifikan membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk memastikan adanya kepastian pelaksanaan prinsip syariah dibentuklah Dewan Pengawas Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi adalah wajib bagi lembaga yang ingin beroperasi yang berbasis sistem syariah.

Dasar hukum dibentuknya dewan pengawas syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah yang termaktub dalam Q.S. At-Taubah 9: 105

³ Bank Indonesia, *Makalah Perkembangan Perbankan Syariah* (Pekanbaru : BI, 2007) , h. 5

⁴ Bank Indonesia, *Makalah Perkembangan Perbankan Syariah* (Pekanbaru : BI, 2011) , h. 12



Artinya :”Dan Katakanlah: ”Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mu'min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui akan Yang Ghaib dan yang Nyata lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan⁵.(Q.S. At-Taubah, 9:105)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia dapat melakukan apa saja termasuk kegiatan ekonomi, akan tetapi semuanya itu akan selalu dalam pengawasan Allah secara langsung dan bersifat melekat, pengawasan Rasulullah yang dalam bentuk pengawasan oleh penguasa dan pengawasan umum yang dilakukan oleh umat Islam. Pengawasan masyarakat dapat diwujudkan secara langsung atau melalui aturan-aturan yang mengatur dan membatasi⁶.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia, pembahasan pengawasan dilakukan oleh dua lembaga primer yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun tidak memiliki hubungan struktural akan tetapi terdapat hubungan koordinatif antara Dewan Syariah Nasional (DPS) dengan Dewan Pengawas Syariah.

Pada awalnya kedua lembaga ini masih diatur dalam peraturan pemerintah dan Peraturan Bank Indonesia. yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam kedua peraturan ini

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Diponegoro, Bandung, 2000).

⁶ Hari Sunandar, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. IV No. 2 Desember 2005. H 12

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Tugas Dewan Pengawas Syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam kontek yang amat luas dan komplek yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interpretasinya sangatlah luas.

Kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah, dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan terletak di atas pundak mereka. Begitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyatakan lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syariah, maka setiap penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syariah menjadi tanggung jawab mereka, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Begitu pula sebaliknya, manakala Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa terdapat penyimpangan terhadap kepatuhan syariah lembaga yang mereka awasi, padahal tidak, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah tersebut dapatlah hancur.

Mengacu pada pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 mengurai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu antara lain :

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara bank, secara keseluruhan dan laporan publikasi bank

- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurangnya-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kedepan direksi, komasaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesinal.⁷

Menurut keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggaran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah, terutama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)⁸.

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah :

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai Mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Sebagai kewajiban Dewan Pengawas Syariah adalah:

1. Mengikuti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan

⁷ Wirdyningsih Dkk, *Bank dan Assuransi Islam di Indonesia*.(Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005), h. 83

⁸ Keputusan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggaran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah

3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin, kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun

Untuk mencapai keberhasilan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka diperlukan langkah-langkah pemberdayaan, baik dari sisi kompetensi, integritas, maupun independensi. Langkah pemberdayaan yang harus dilakukan memerlukan perencanaan dan pengembangan secara bertahap dan memperhatikan kesiapan bank dan sumber daya insan Dewan Pengawas Syariah.

Dalam pelaksanaan fatwa ditingkat Dewan Pengawas Syariah (DPS), ketentuan yang dijelaskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) masih bersifat umum. Oleh karena itu, seharusnya fatwa tersebut harus jelas dan dibuat petunjuk pelaksanaannya, agar tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan produk tersebut.

Pelaksanaan produk perbankan Islam dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad harus diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Apabila ada akad yang belum difatwakan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada Dewan Syariah Nasional. Sebelum ada persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN)⁹.

Fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah berlangsung sejak produk tersebut akan berjalan hingga akad produk tersebut selesai. Ini guna menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada saat akad tersebut dibuat, baik dari pihak Dewan Pengawas Syariah maupun pelaksanaan isi akad.

⁹ *Ibid*

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul penelitian: **"Analisa Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dan Implementasinya Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Harapan Raya"**

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka perlu ada pembatasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti mengenai **Analisa Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya.**

2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya?
2. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syari'ah Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Harapan Raya?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya.
- 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syari'ah Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Harapan Raya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Disamping menambah pengalaman dan menjadi pembanding antara ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam aplikasi nyata di dunia kerja dan publik (masyarakat) juga sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana.

b. Bagi Praktisi

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi praktisi mengenai pelaksanaan dan implelementasi tugas Dewan Pengawas Syariah di bank atau lembaga keuangan syariah dalam membuat Kebijakan-kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas dan implemntasinya di perbankan atau lembaga keuangan syariah.

c. Bagi Akedemisi

Sebagai pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya di bank atau lembaga keuangan syariah dan sebagai acuan referensi serta sebagai bahan penunjang untuk penelitian selanjutnya.

D. Metode Penelitian

1. Waktu Dan Lokasi Peneliti

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan Maret hingga Juni tahun 2011

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada pasar PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya yang terletak Jalan Imam Munandar No 155.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempat penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field reseach*, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan mendatangi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru secara langsung sebagai objek penelitian.

3. Objek Dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan implementasinya.

b. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pekanbaru guna mengetahui pelaksanaan dan implementasi DPS di BSM Cabang Harapan Raya menurut karyawan.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik yang didasarkan pada

masalah yang diteliti yang ada di lapangan serta mengeksplorasi ke dalam bentuk laporan.

Penulis juga memaparkan data dalam bentuk dokumen maupun fail, kemudian fail dari hasil penelitian tersebut akan dideskripsikan ke dalam data kualitatif, sehingga memudahkan penulis untuk mengambil kesimpulan. Data tersebut adalah data mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di bank atau lembaga keuangan syariah (BSM syariah Cabang Utama Pekanbaru).

5. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak Perusahaan. Data tersebut adalah pernyataan pejabat perusahaan mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak perusahaan. Data tersebut adalah data yang berupa dokumen, arsip atau literatur-literatur lain yang berkaitan dengan objek dengan penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dan dibutuhkan dalam penelitian ini. Maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala-gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan penulis terhadap pengurus dan pelaku pasar serta pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini

6. Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kualitatif maupun kuantitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas¹⁰.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan¹¹. Sampel pada penelitian ini adalah keterwakilan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya pekanbaru.

c. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode pengambilan sampel probabilitas/acak (*random sampling*), yaitu suatu metode pemilihan ukuran sampel dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel dengan memberikan pertanyaan kepada sampel yang dianggap sudah mewakili dan dapat memberikan informasi yang jelas tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh penulis.

Jumlah karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya adalah 27. Pada penelitian ini penulis mengambil seluruh karyawan dijadikan sampel, pengambilan seluruh populasi dijadikan sampel dinamakan total sampling¹². pada penelitian ini dari keseluruhan populasi.

7. Teknik Pengolaan dan Analisa data

¹⁰ Usman, Husaini dan Akbar, S Purnomo, *Metodelogi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua, (Jakarta : PT Bumi Aksara. 2008), h. 42

¹¹ *Ibid*, h 42

¹² Setiadi, Nugroho, *Perilaku Konsumen*, Edisi Kedua (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008) h. 16

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa data secara diskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian yang diajukan pada penelitian ini penulis membagi kedalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan bahasan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG HARAPAN RAYA

Pada bab ini berisikan uraian sejarah dan perkembangan Bank Syariah Mandiri, dasar Hukum Pendirian, Visi, Misi dan budaya kerja Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya, bentuk produk dan jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya, dan struktur organisasi mengenai teori-teori yang mendukung penelitian diantaranya pengertian Dewan Pengawas Syariah, tugas Dewan Pengawas Syariah, implementasi tugas Dewan Pengawas Syariah, konsep operasinal, kerangka berpikir dan hipotesa.

BAB III KONSEP PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS

SYARI'AH DAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

Bab ini berisikan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian diantaranya pengertian Dewan Pengawas Syariah, tugas Dewan Pengawas Syariah, implementasi tugas Dewan Pengawas Syariah, konsep operasinal, kerangka berpikir dan hipotesa.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS

SYARI'AH DAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

Dalam bab ini menjelaskan hasil data penelitian mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Harapan Raya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan uraian mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran yang bisa diambil sebagai bahan mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG HARAPAN RAYA

A. Sejarah Dan Perkembangan Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999 sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional adalah PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Bank Susila Bakti berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing¹.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan

¹Annual Report . PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2011

tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru Bank Susila Bakti.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri. sebagai respon atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha Bank Susila Bakti berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999².

² Rinda, SE. Ak. Pegawai (wawancara), Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya, 12 juni 2011

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik³.

B. Dasar Hukum Pendirian Bank Syariah Mandiri

Dasar hukum pendirian PT. Bank Syariah Mandiri yaitu Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri⁴

C. Visi, Misi Dan Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri

a. Visi

“Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha”

b. Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat

³ Annual Report . PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2011

⁴ *Ibid*

4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

c. Budaya Kerja

Sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah, Bank Syariah Mandiri menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada: *akhlaqul karimah* (budi pekerti mulia), yaitu sikap pribadi yang terangkum dalam nilai utama, disingkat dengan “SIFAT”, yaitu:

1. Siddiq (Integritas)

Menjaga martabat dengan integritas, diawali dengan niat yang tulus, berfikir jernih, bicara benar, sikap terpuji, dan perilaku teladan.

2. Istiqamah (Konsisten)

Konsisten adalah kunci menuju sukses, memegang komitmen, sikap optimis, pantang menyerah kesabaran, dan kepercayaan diri.

3. Fhathonah (Profesional)

Professional adalah gaya kerja Bank Syariah Mandiri, semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil, dan adil.

4. Amanah (Tanggung Jawab)

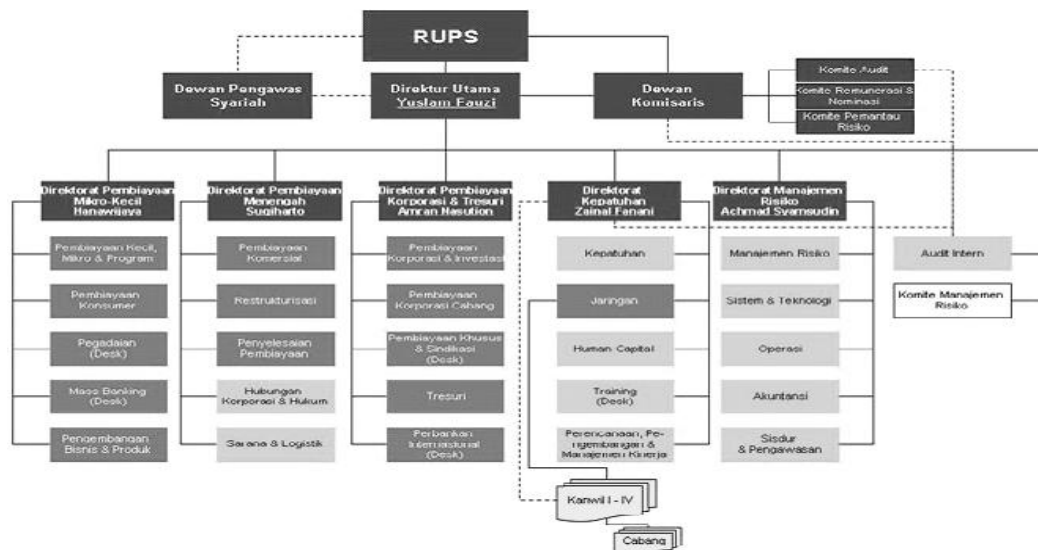
Terpercaya karena penuh tanggung jawab, menjadi terpercaya, cepat tanggap, objektif, akurat, dan disiplin.

5. Tabligh (Kepemimpinan)

Kepemimpinan berlandaskan kasih sayang, selalu tansfaran, membimbing, visioner, komunikatif, dan memberdayakan.

D. Struktur Organisasi Pada Bank Syariah Mandiri

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri Syariah



E. Bentuk-Bentuk Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Harapan Raya

Adapun produk-produk yang ada di BSM Cabang Harapan Raya sebagai berikut⁵:

1) Produk Pendanaan (*Funding*)

1. Tabungan BSM, yaitu investasi fleksibel dan aman, berupa tabungan dalam Rupiah.
2. Tabungan BSM Dollar, yaitu investasi fleksibel dan aman, berupa tabungan dalam Dollar.
3. Tabungan Mabrur BSM, yaitu paling sesuai untuk mewujudkan ibadah haji dan umrah anda.
4. Tabungan Qurban BSM, yaitu ibadah qurban dan akikah lebih mudah dan bermanfaat.
5. Tabungan investasi Candikia, yaitu mengantarkan buah hati anda meraih cita-cita.
6. Tabungan BSM simpatik, yaitu citra menju cerdas dan berprestasi.
7. Deposito BSM, yaitu deposito berjangka sebagai investasi yang aman, menentram dan menguntungkan.
8. Deposito BSM Valas, yaitu deposito berjangka dalam dollar sebagai investasi yang aman, menentramkan, dan menguntungkan.
9. Giro BSM, yaitu Giro dalam rupiah guna mempelancar transaksi bisnis dengan aman.
10. Giro BSM Valas, yaitu Giro dalam Dollar guna transaksi bisnis dengan aman.

⁵ Rinda, SE.,Ak. Pegawai (*wawancara*) Bank Syariah Mandiri KCP Harapan Raya, 12 Juni 2011

11. Giro BSM Dollar Singapura, yaitu Giro dalam Dollar Singapura guna mempelancar transaksi bisnis dengan aman.

12. Obligasi BSM, yaitu investasi yang aman dan menguntungkan.

2) Produk Pembiayaan (*Financing*) terdiri dari:

1. Pembiayaan Mudharabah BSM
2. Pembiayaan Musyarokah BSM
3. Pembiayaan Murabahah BSM
4. Pembiayaan Talang Haji BSM
5. Istisha' BSM
6. Ijarah BSM
7. Pembiayaan Dana pendidikan
8. Gadai Emas

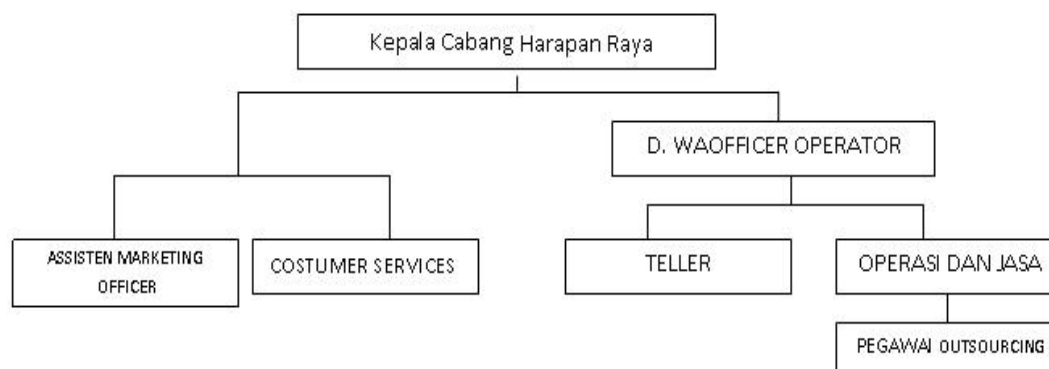
3) Jasa-jasa (*Service*)

1. BSM *card*, yaitu sarana untuk transaksi pada ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri dan ATM Bersama.
2. Sentra Bayar BSM, yaitu layanan BSM Untuk membayar tagihan Telkom, Indosat, M3, Stelindo, Retelindo, 1M3 Dan PLN.
3. BSM SMS *Banking*, yaitu suatu produk layanan transaksi perbankan melalui fasilitas SMS.
4. BSM *Electronic Payroll*, yaitu suatu pelayanan pembayaran gaji instansi dengan teknologi computer.

5. BSM L/C, yaitu suatu produk layanan L/C dari BSM, transaksi antar negara.
6. BSM SUHC, yaitu Suadi Umrah dan Haji Card, kartu pra-bayar, dari Al-Rajhi Banking yang digunakan pada saat umroh dan haji.
7. BSM *Intercity Clearing*, yaitu suatu jasa penagihan warkat Bank dari luar wilayah keliring dengan cepat.
8. BSM *Real Time Gross Setlemen (RTGS)*, yaitu jasa transfer uang valuta rupiah, antar bank secara real time
9. Transfer dalam kota (LLJ) BSM, yaitu jasa pemindahan dana antar bank dalam suatu wilayah kliring local.
10. Transfer Valas BSM, yaitu jasa transfer dari bank ke nasabah BSM, dalam Negeri maupun luar negeri.
11. Pajak *On-Line* BSM, yaitu layanan pembayaran pajak dengan cara mendebit rekening atau pembayaran tunai.
12. Zakat *On-Line* BSM, yaitu layanan pembayaran zakat dengan cara mendebit rekening atau dengan cara membayar tunai.

F. Struktur Organisasi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Harapan Raya

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya



Adapun gambaran skematis yang menunjukkan hubungan aktivitas, fungsi, tugas wewenang, dan tanggung jawab yang dibebankan untuk mencapai tujuan perusahaan sebagai berikut⁶:

1) Pimpinan Cabang

- b. Mengawasi dan melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- c. Menyelenggarakan pelayanan pemegang polis sehingga menimbulkan citra yang baik bagi perusahaan.
- d. Membina dan mengawasi karyawan dilingkungan cabang.
- e. Mengawasi dan mengkoordinir terlaksananya operasi perusahaan dilingkungan Kantor cabang.
- f. Menandatangani surat yang berhubungan dengan, surat keluar perusahaan berdasarkan ketentuan yang ada dan seputar surat-surat kantor.
- g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan administrasi serta keuangan dikantor cabang.

2) Kepala Cabang

- a. Bertanggung jawab kepada kantor cabang tentang jalannya Cabang.
- b. Mengambil keputusan atas semua keinginan dibidang pemasaran, operasional sampai dengan batas wewenangnya di cabang.

⁶ *Ibid*

- c. Membantu kualitas aktiva produktif dan mengupayakan kolektabilitas lancar minimal sama dengan target yang telah ditetapkan oleh Direksi.
- d. Seluruh nasabah dengan tetap terlaksananya sistem dan prosedur yang berlaku.
- e. Bertanggung jawab terlaksananya pengamanan, administrasi dan pemeliharaan kekayaan yang ada di kantor cabang.

3) Customer Service

- a. Memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai produk-produk bank serta syarat-syarat maupun prosedurnya.
- b. Melayani pembuatan rekening giro, tabungan biasa, dan tabungan deposito sesuai dengan permohonan nasabah.
- c. Meyelenggarakan atau melayani komplek BSM Card
- d. Melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa perbankan.
- e. Melayani nasabah yang membutuhkan informasi tentang saldo atau mutasi rekening
- f. Kebenaran memberikan penjelasan atau informasi mengenai produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah.
- g. Kebenaran input data nasabah.
- h. Kelancaran dan ketepatan pelayanan kepada nasabah.
- i. Kerahasiaan password atau sandi yang menjadi wewenang.

4) Teller

- a. Melayani penyetoran dan penerikan tunai atau non tunai dengan benar dan cepat.
- b. Menjaga ketertiban dan keamanan sistem komputerisasi secara fisik maupun administrasi.

- c. Menjaga ketertiban dan keserasian lingkungan kerja.
- d. Melihat kesesuaian tanda tangan nasabah pada bukti penerikan contoh tanda tangan.
- e. Kesesuaian rincian saldo dalam rincian uang tunai.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS

SYARI'AH DAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS

SYARI'AH

A. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Didunia perbankan yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk memastikan adanya kepastian pelaksanaan prinsip syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi adalah wajib bagi lembaga yang ingin beroperasi yang berbasis sistem syariah.

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi/ pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah¹.

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah².

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta. Dewan Pengawas Syariah melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi

¹ Hari Sunandar, Jurnal Hukum Islam . Vol. IV No. 2 Desember 2005, h 25

² Keputusan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI)

hasus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama sekali mengesahkan dan mengawasi produk-produk perbankan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku.

B. Tugas Dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Tugas Dewan Pengawas Syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam kontek yang amat luas dan komplek yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interpretasinya sangatlah luas. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis syariah³.

Kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah, dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan terletak di atas pundak mereka. Begitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyatakan lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syariah, maka setiap penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syariah menjadi tanggung jawab mereka, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Begitu pula sebaliknya, manakala Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa terdapat penyimpangan terhadap kepatuhan syariah lembaga yang mereka awasi, padahal tidak, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah tersebut dapatlah hancur.

Mengacu pada pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 mengurai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu antara lain:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

³ Musatafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arief Mufraeni dan Bay Sapta Utama, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010), h . 293

- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara bank, secara keseluruhan dan laporan publikasi bank
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurangan-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kedepan direksi, komasaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesinal.⁴

Menurut keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 03 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggaran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah, terutama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah instusi yang mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DNS).

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah⁵:

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Sebagai kewajiban Dewan Pengawas Syariah adalah:

⁴ Wirdyningsih Dkk, *Bank dan Assuransi Islam di Indonesia*.(Jakarta :Kencana Pranada Media, 2005), h.

1. Mengikuti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan
3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin, kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

C. Implementasi Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah dibentuk untuk mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dan tidak menyimpang dari garis syariahnya. Adapun yang menjadi sistem operasional perbankan syariah dan prinsip-prinsip dasar dari produk-produk perbankan syariah adalah⁶:

1. Sistem Operasional Perbankan Syariah

a. *Profit Sharing* (bagi hasil)

Aplikasi Kontrak *Al-Mudharabah* dalam Bank Islam

1.1. Pemisahan antara dana *al-mudharabah* dan harta lain, termasuk harta *mudharib*.

1.2. Dana *al-mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber dana lainnya

b. Penghimpunan Dana

Modal (*Onwer*)

Titipan (*Wadi'ah*)

Investasi (*Mudharabah*)

⁶Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 156

c. Tabungan (*Wadi'ah Dan Mudharabah*)

d. Pembiayaan

Menurut sifat pembiayaanya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, dagang, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluan pembiayaan produktif dibagi dua, yaitu⁷:

- 1) Pembiayaan modal kerja dan
- 2) Pembiayaan investasi

2. Prinsip-Prinsip Dasar Dari Produk-Produk Perbankan Syariah.

a. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Depositori/ Al-Wadiah*)

1. Pengertian *Al- Wadiah*

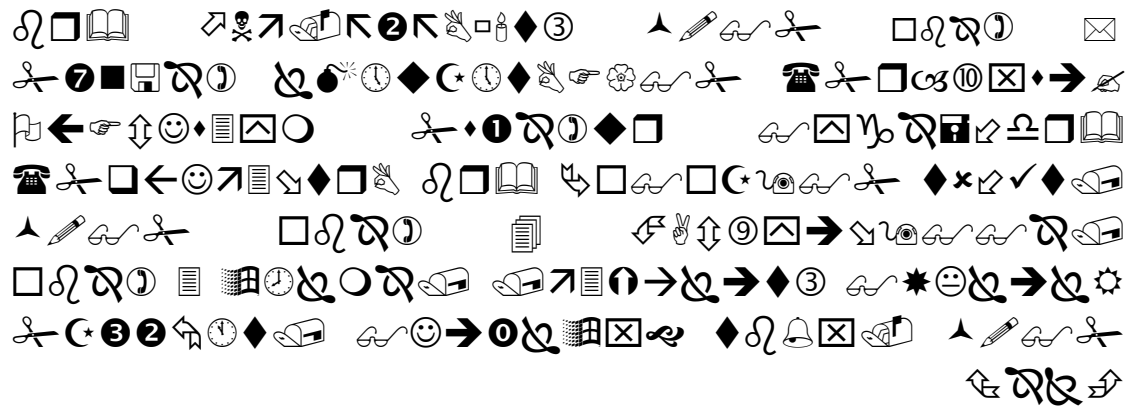
Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki.

Landasan Syariah

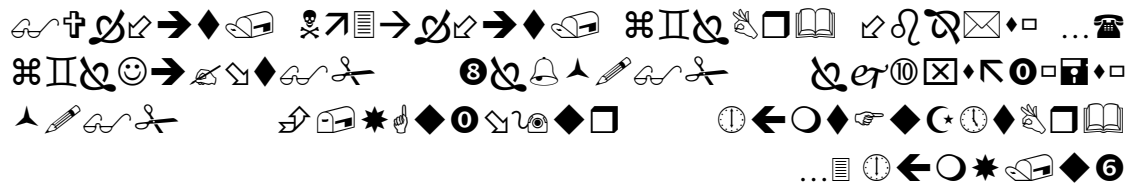
1.1. Al-Qur'an

Adapun landasan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an mengenai prinsip *Al-Wadiah*, yaitu terdapat dalam QS 4: 58 dan QS 2: 283.

⁷ *Ibid* h 160



Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (QS an-Nisaa: 58)*⁸.



Artinya:jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....(QS Al-Baqarah: 283)⁹

2. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

1. *Al-Musyarakah*

1.1. Pengertian *Al-Musyarakah*

⁸ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (diponogoro, Bandung, 2000)

⁹ *Ibid*

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertauba¹¹t. (QS Shaad: 24)

1.3. Jenis-Jenis *Al-Musyarakah*

a. *Syirkah al-'Inan*

Syirkah al-'Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak memberikan keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka.

b. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

c. *Syirkah A'maal*

Syirkah A'maal adalah kontrak kerja sama dua orang atau seprofesi untuk menerima kerja bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

d. *Syirkah Wujud*

Syirkah Wujud adalah kontak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis.

2. *Al-Mudharabah*

2.1. Pengertian *Al-Mudharabah*

¹¹ *Ibid*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Secara teknis *al-Mudharabah* akad kerja sama usaha antara pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan lainnya menjadi pengelola.

2.2. Landasan Syariah

Secara umum, landasan syariah *al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha hal ini tampak pada dalil-dalil yang kuat. Adapun dalilnya, yaitu:

وَمَنْ يَرْزُقْهُ مِنْهُ فَلْيُكْفِرْ بِهِ ۖ يَكْفُرْ بِالْمَرْكُومِ ۚ الْمَرْكُومُ الْمُسْتَضْعَفُ ۚ وَالْمُسْتَضْعَفُ الْمُسْتَضْعَفُ ۚ وَالْمُسْتَضْعَفُ الْمُسْتَضْعَفُ ۚ ...
 ...

Artinya: ...dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah,...¹². (QS al – muzzamnil: 20)

وَمَنْ يَرْزُقْهُ مِنْهُ فَلْيُكْفِرْ بِهِ ۖ يَكْفُرْ بِالْمَرْكُومِ ۚ الْمَرْكُومُ الْمُسْتَضْعَفُ ۚ وَالْمُسْتَضْعَفُ الْمُسْتَضْعَفُ ۚ وَالْمُسْتَضْعَفُ الْمُسْتَضْعَفُ ۚ ...
 ...

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung¹³ (QS Al Jumuah: 10)

2.3. Jenis-jenis Al-Mudharabah

¹² Ibi, h 159

¹³ Ibid

Secara umum mudharabah dibagi dua, yaitu:

a. *Al-Mudharabah Muthalaqoh*

Mudharabah Muthalaqoh adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. *Al-Mudharabah Muqayyadah*

Al-Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *Mudharabah Muthalaqoh*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

3. *Al-Muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing)*

3.1. Pengertian *Muzara'ah*

Al-Muzara'ah adalah kerja sama dengan pengelola pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

3.2. Landasan Syariah

Diriwayatkan oleh Buhari dari jabir mengatakan bahwa bangsa arab senantiasa mengelola tanah dengan *Muzara'ah* dengan rasio bagi hasil $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ maka Rasulullah bersabda "hendaklah menanam dan menyerahkan untuk digarap, barang siapa yang tidak melakukannya salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya"

4. *Al-Musaqah (Plantation Management Fee Based On Certain Portion of Yield)*

4.1. Pengertian *Musaqah*

Al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap bertanggung jawab pada penyiraman dan pemeliharaan, dan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen

4.2. Landasan Syariah

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah pernah tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka.

3. Jual Beli (*Sale And Purchase*)

Dalam Islam jual beli telah banyak dibahas oleh ulama fikih. Dari pembahasan ulama fikih dapat dikelompokkan antara lain:

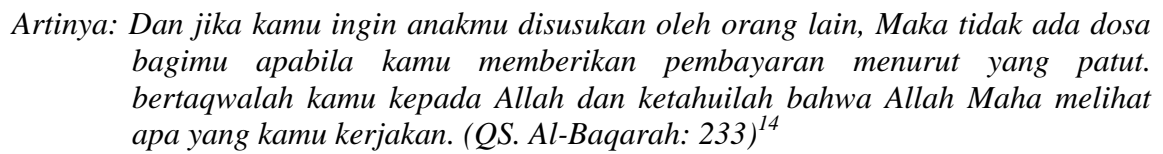
1. *Bai'al Mudharabah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
2. *Bai'al As-salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.
3. *Bai'al Istishna* merupakan kontrak antara penjual dengan pembuat barang.

4. Sewa (*Operational Lease And Financial*)

1. *Al-Ijarah (Operational Lease)*

Al-Ijarah (Operational Lease) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang itu sendiri

Landasan Qur'an terdapat pada Q.S Al-baqarah Ayat 233



Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (Financial Lease With Purcase Option) adalah jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.

¹⁴ *Ibid*

BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DAN IMPLEMENTASI

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

A. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya diresmikan pada tanggal 10 September 2004 yang terletak di Jalan Imam Munandar nomor 115 Harapan Raya Pekanbaru¹. Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya merupakan salah satu dari bank yang menjalankan prinsip Syariah dengan visi dan misi.

Menurut dasarnya setiap bank atau lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah sejatinya dijalankan dengan prinsip syariah dan sistem syariah. Karena itu kesesuaian operasi dan praktek perbankan syariah merupakan prasyarat mendasar dalam perbankan syariah. Untuk tujuan itu semua perbankan yang beroperasi prinsip dan sistem syariah wajib memiliki istiusad internal yang independen yang disebut dewan pengawas syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah merupakan syarat mutlak bagi setiap lembaga keuangan syariah tidak ada pengecualian. Lembaga keuangan syariah yang menjalankan prinsip keuangan syariah yang secara khusus memastikan bank tersebut berjalan harus sesuai dengan syariat Islam. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam sebuah instansi atau lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah diharapkan dapat mengawasi semua jalannya operasi dan praktek instansi atau lembaga keuangan yang menjalankan konsep syariah yang sesuai dengan hukum syariat Islam. untuk mengawasi semua kegiatan perbankan agar sesuai dengan prinsip syariah, secara umum Dewan

¹ Rinda, SE, Ak, *Wawancara*. 12 Juni 2011

pengawas Syariah seharusnya terdiri dari orang-orang yang sedikit banyaknya menguasai hukum dagang yang berlaku dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara umum dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah memiliki tugas dan fungsinya yang mengacu pada pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 mengurai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu antara lain :

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara bank, secara keseluruhan dan laporan publikasi bank
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurangan-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kedepan direksi, komasaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesinal².

Namum permasalahan yang dihadapi yaitu keberadaan dewan pengawasan syariah itu sendiri, pada PT. Bank Syariah Mandiri memiliki Dewan Pengawas Syariah berkedudukan di PT. Bank Syariah Mandiri Pusat sementara Bank Mandiri Syariah untuk saat ini sudah menyebar diseluruh daerah yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagaimana pelaksanaan tugas dan implementasi tugas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri khususnya Kantor Cabang Harapan Raya, salah satunya contoh dalam pembagian waktu saja tidak mungkin Dewan Pengawas Syariah dapat tiap waktu ada untuk megawasi jika di di setiap kantor cabang terjadinya penyimpang yang dilakukan. Dilain hal ternyata pengawasan yang

² Wirdyningsih Dkk, *Bank dan Assuransi Islam di Indonesia*.(Jakarta :Kencana Pranada Media, 2005), h.

dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah hanya dilakukan enam bulan sekali setahun dan pelaporan mengenai praktek yang terjadi dilapangan hanya dilakukan oleh pimpinan ke Dewan Pengawas Syariah³. Hal ini tentu menimbulkan peluang terjadi penyimpang-penyimpang prinsip syariah oleh pihak bank. Dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah dan implementasinya di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya dapat dipertanyakan. Untuk membuktikan dan menjawab pertanyaan itu berikut ini pernyataan responden mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah.

Hasil penelitian didapat pernyataan responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Pernyataan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Dalam Memastikan Dan Mengawasi Kesesuaian Kegiatan Operasional Dengan Fatwa Dewan Syariah nasional

DPS telah memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional	Jumlah	Persentase (%)
Ya	25	52,59
Tidak	2	7,41
Jumlah	27	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2011

Berdasarkan pada tabel 4.1 di atas dapat diketahui mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya dalam memastikan dan

³ Uzon, SE, i, Pegawai (Wawancara) Bank Syariah Mandiri KCP Harapan Raya, 8 Juni 2011,

mengawasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan operasional dengan fatwa yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional. Dari hasil penelitian 25 responden atau 92,59% dari 27 responden menyatakan ya bahwa Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugasnya dalam memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) , sedangkan 2 respond atau 7,41% dari 27 responden yang dijadikan sampel menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan tugasnya dalam memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum atau sebahagian besar Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugasnya, yaitu telah memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Tabel 4.2

Pernyataan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dalam Melakukan Penilaian Aspek Syariah Terhadap Pedoman Operasional dan Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya

DPS telah melakukan penilaian aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya	Jumlah	Persentase (%)
Ya	26	92,59
Tidak	1	7,41
Jumlah	27	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2011

Dari tabel 4.2 di atas didapat informasi mengenai pelaksanaan tugas dalam melakukan penilaian aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui 26 respon atau 92,59% dari 27 responden menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah telah melakukan tugasnya, yaitu melakukan penilaian aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk

Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya sedangkan 1 respon atau 3,71% dari 27 responden menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan tugas dalam melakukan penilaian aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tugas yang Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan penilaian aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya telah dilakukan dengan baik.

Tabel 4.3

Pernyataan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dalam Memberikan Opini Mengenai Aspek Syariah Terhadap Pelaksanaan Operasional dan Laporan Publikasi Konsep Syariah

Pemberian opini mengenai aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank, secara keseluruhan dan laporan publikasi bank yang menjalankan konsep syariah dengan baik oleh DPS	Jumlah	Persentase (%)
Ya	27	100
Tidak	0	-
Jumlah	27	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2011

Dari tabel 4.3 di atas diketahui terlihat gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan opini tentang aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional dan laporan publikasi konsep syariah. Pada tabel di atas diketahui 27 respon atau 100% dari 27 responden mengatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugasnya dalam memberikan opini mengenai aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional dan laporan publikasi konsep syariah dengan baik.

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan opini mengenai aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional dan laporan publikasi konsep syariah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah

dalam memberikan opini mengenai aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional dan laporan publikasi konsep syariah telah dilakukan dengan baik dan optimal.

Tabel 4.3

Pernyataan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dalam Memberikan Opini Mengenai Aspek Syariah Terhadap Pelaksanaan Operasional dan Laporan Publikasi Konsep Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya

Penyampaian laporan hasil Yang Dilakukan DPS sekurangan-kurangnya setiap enam bulan kedepan direksi, komasaris, Dewan Syariah Nasional dan BI dengan benar dan baik	Jumlah	Persentase (%)
Ya	20	74.07
Tidak	7	25.93
Jumlah	27	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2011

Dari tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan opini mengenai aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional dan laporan publikasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya. Dari tabel di atas diketahui 20 respon atau 74,07% dari 27 responden yang dijadikan sampel penelitian menyatakan ya bahwa Dewan Pengawas Syariah telah melaksnaakan tugasnya, yaitu telah memberikan opini mengenai aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional dan laporan publikasi di Bank Syariah Mandiri Cabang harapan raya, sedangkan 7 respon atau 25,93% dari 27 responden yang dijadikan sampel penelitian menyatakan Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan tugasnya, yaitu memberikan opini mengenai aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional dan laporan publikasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya.

Dengan demikian, dari hasil pengamatan pada tabel 4.4 diatas dapat disimpulkan secara umum atau sebahagian besar responden menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah telah

melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan opini mengenai aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional dan laporan publikasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya. Dengan kata lain pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan dengan baik dan hanya sebahagian kecil yang belum terlaksanakan.

Secara umum Dari penjelasan tabel-tabel di atas dapat di ambil kesimpulan mengenai pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah di Bank Syariah Mandiri Tbk, khususnya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru telah dilakukan dengan baik. Hal ini terbukti 20 hingga 27 responden atau 74,07% hingga sampai 100% dari 27 responden menyatakan pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya telah dilakukan dengan baik oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal didukung hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rinda, salah seorang pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya, “Ia mengatakan semua produk dan pelaksanaan operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru telah berjalan dengan konsep dan prinsip syariah dengan baik yang senantiasa diawasi dan telah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah Yang mengacu pada fatwa-fatwa”⁴.

B. Implementasi Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syari’ah

Implementasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah diharapkan lebih mampu melaksanakan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan operasional dan sistem yang berlaku di sebuah bank yang menjalani prinsip syariah. dengan demikian terlaksananya pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah dengan baik tentunya akan membuktikan eksistensi Dewan Pengawas Syariah menjadi sebuah lembaga yang mengelola

⁴ Rinda, SE, Ak, wawancara, 12 Juni 2011

kebutuhan dan keinginan konsumen yang membutuhkan dan menginginkan adanya prinsip dan pedoman lembaga keuangan yang mengenakan prinsip Islam serta mampu menyiasati akan adanya terjadi penyimpangan dan penyalah guna yang berlandaskan prinsip keuangan lembaga atau instusi syariah. Dengan adanya keberadaan Dewan Pengawas Syariah diharapkan mampu menjadi salah satu sumber informasi yang mendatil mengenai lembaga keuangan tersebut, apakah lembaga keuangan tersebut telah menjalani prinsip perbankan syariah dengan baik atau masih melanggar perinsip-prinsip perbankan syariah.

Penelitian mengenai implementasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya dalam memantau, mengawasi dan memaparkan uraian yang detail mengenai produk dan perkembangan produk syariah sangat dibutuh guna mengali informasi mengenai eksistensi lembaga keuangan syariah jika dibandingkan dengan produk perbank konvensional.

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Pernyataan Responden Mengenai Implentasi Pengawasan dan Kepastian
Kesesuaian Kegiatan Operasional Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Yang
Dilakukan Oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan
Raya

Apakah Dewan Pengawas Syariah telah memastikan dan mengawasi semua kesesuaian kegiatan operasional BSM berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional	Jumlah	Persentase (%)
--	--------	----------------

baik konsep operasional maupun produk secara mendetil		
Ya	24	88,88
Tidak	3	11,12
Jumlah	27	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2011

Dari tabel 4.5 di atas didapat informasi mengenai informasi pengawasan dan kepastian kesesuaian kegiatan operasional berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya. Dari tabel 24 responden atau 88,88% dari 27 responden yang dijadikan sampel menyatakan ya dalam implementasinya Dewan Pengawas Syariah telah memastikan dan mengawasi semua kesesuaian kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional baik konsep operasional maupun produk secara mendetil, sedangkan 3 responden atau 11,12% dari 27 responden yang menjadi sampel menyatakan tidak dalam implementasinya Dewan Pengawas Syariah tidak memastikan dan mengawasi semua kesesuaian kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional baik konsep operasional maupun produk secara mendetil.

Dari tabel 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasinya Dewan Pengawas Syariah telah memastikan dan mengawasi semua kesesuaian kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional baik konsep operasional maupun produk secara mendetil.

Tabel 4.6
Pernyataan Responden Mengenai Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri Pada Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional

Dalam pengawasan terhadap konsep syariah apakah Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri harus mematuhi Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional	Jumlah	Persentase (%)
Ya	23	85,18
Tidak	4	14,82
Jumlah	27	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2011

Pada tabel 4.6 di atas di dapat informasi mengenai kepatuhan Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri khususnya Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dari tabel 4.6 diketahui 23 responden atau sebesar 85,18% dari 27 responden menyatakan ya Dalam pengawasan terhadap konsep syariah Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri harus mematuhi Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, sedang 4 responden atau sebesar 14,82% dari 27 responden yang dijadikan sampel menyatakan tidak bahwa dalam pengawasan terhadap konsep syariah Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri tidak mematuhi Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Berdasarkan tabel diatas dan urainnya diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap konsep syariah dilembaga keuangan syariah Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri harus dan selalu mematuhi Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai rujukan pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah.

Tabel 4.7
Pernyataan Responden Mengenai Produk dan Konsep Operasional Yang Diawasi
Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya

Apakah semua produk dan konsep operasional yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional	Jumlah	Persentase (%)
Ya	26	96,29
Tidak	1	3,71
Jumlah	27	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2011

Dari tabel 4.7 di atas terlihat dengan jelas tanggapan responden mengenai produk-produk dan konsep operasional yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Pada tabel 4.7 di atas 26 responden atau sebesar 96,29% dari 27 sampel menyatakan ya bahwa semua produk dan konsep operasional yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan 1 responden atau sebesar 3,71%

dari 27 sampel mengatakan tidak bahwa semua produk dan konsep operasional yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Berdasarkan pada tabel 4.7 dan urai diatas dapat disimpulkan bahwa sebahagian besar semua produk dan konsep operasional yang diawasi oleh Dewan pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dengan demikian berarti Dewan Pengawas Syariah telah mengimplementasi atau melaksanakan pelaksanaan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan acuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Tabel 4.8
Pernyataan Responden Mengenai Acuan Pengawasan Terhadap Konsep Operasional dan Produk pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya

Apakah acuan pengawasan terhadap konsep operasional dan produk yang dilakukan oleh DPS Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional	Jumlah	Persentase (%)
Ya	21	77,77
Tidak	6	22.23
Jumlah	27	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2011

Dari tabel 4.8 di atas terlihat dengan jelas mengenai respon responden mengenai acuan Pengawasan terhadap konsep operasional dan produk pada Bank Sayariah Mandiri Cabang harapan Raya. Pada tebel 4.8 di ketahui 21 responden atau sebesar 77,77% dari 27 sampel mengatakan ya bahwa acuan pengawasan terhadap konsep operasional dan produk yang dilakukan oleh DPS Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan 6 respoden atau sebesar 22,23% dari 27 responden mengatakan tidak bahwa acuan pengawasan terhadap konsep operasional dan produk yang dilakukan oleh DPS Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dari tabel 4.8 dan uraian di atas ditarik kesimpulan bahwa sebahagian besar acuan pengawasan terhadap konsep operasional dan produk yang dilakukan oleh DPS Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dengan demikian, dapat dikatakan dalam implementsinya Dewan Pengawas Syariah berpedomanakan pada acuan pengawasan terhadap konsep operasional dan produk yang dilakukan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional

Tabel 4.9
Pernyataan Responden Mengenai Pembimbingan, Penyuluhan dan Pelatihan
Dilaksanakan Oleh Dewan Pengawas Syariah Kepada Karyawan Bank Syariah Mandiri
Cabang Harapan Raya

untuk mengklafikasi konsep operasional dan produk Syariah, apakah DPS melakukan pembimbingan, penyuluhan pelatihan kepada Karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya	Jumlah	Persentase (%)
Ya	20	74.07
Tidak	7	25.93
Jumlah	27	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2011

Dari tabel 4.9 di atas terlihat dengan jelas respon para responden mengenai bimbingan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Oleh Dewan Pengawas Syariah kepada karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya. Pada tabel 4.9 di atas 20 responden atau sebesar 74,07% dari 27 responden menyatakan ya bahwa untuk mengklafikasi konsep operasional dan produk Syariah Dewan Pengawas Syariah melakukan pembimbingan, penyuluhan pelatihan kepada Karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya agar karyawan dapat memahami dan mengerti konsep operasional dan prosuk-produk yang tergolong dalam konsep operasional dan produk syariah dan 7 respoden atau sebesar 25,93% dari 27 responden menyatakan tidak

bahwa untuk mengklafikasi konsep operasional dan produk Syariah Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan pembimbingan, penyuluhan pelatihan kepada Karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya agar karyawan dapat memahami dan mengerti konsep operasional dan prosuk-produk yang tergolong dalam konsep operasional dan produk syariah.

Dari uraian tebel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum untuk mengklafikasi konsep operasional dan produk Syariah Dewan Pengawas Syariah melakukan pembimbingan, penyuluhan pelatihan kepada Karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya agar karyawan dapat memahami dan mengerti konsep operasional dan prosuk-produk yang tergolong dalam konsep operasional dan produk syariah

Dengan kata lain Dewan Pengawas Syariah telah melakukan bimbingan , penyuluhan dan pelatihan kepada karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Cabang Harapan Raya secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini didukung hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Rinda, SE. Ak, salah seorang karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya ia mengatakan “karyawan Syariah Mandir Cabang Harapan Raya cukup paham dan mengerti mengenai konsep operasional dan produk Bank Syariah Mandiri karena telah mendapatkan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan yang kesemuanya dieberikan oleh Dewan Pengawas Syariah yang merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan peneliti dalam bagaian sebelumnya dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, khususnya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya, yaitu memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank, penilaian aspek syariah, dan pemberian opini terhadap konsep operasional dan produk syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasioanal serta penyampaian laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan kepada direksi, komesaris, dan Dewan Syariah Nasional. Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan sebagian besar responden mengatakan baik.
2. Implementasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu mengawasi konsep operasional dan produk-produk perbankan. Dari hasil penelitian yang dilakukan sebahagian besar responden mengatakan bahwa implemantasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya sudah dilakukan dengan baik.

B. Saran

1. Dewan Pengawas Syariah hendaknya memperbaiki sistem pengawasan agar tidak memberikan peluang kepada lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah.

2. Kepada pihak Bank yang menggunakan prinsip syariah hendaklah menerapkan sistem perbankan syariah secara kafah agar prinsip syariah tidak ternodai oleh kepentingan se pihak.
3. Kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti secara komperhensif mengani Dewan Pengawas Syariah Sehingga kita dapat lebih luas memahami dan mengetahui tentang DPS secara mendatail, dan harapan penelitian selanjut tidak hanya pada bank saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktik*, 2001, Gema Insani Press: Jakarta
- Arbi Syarif, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, 2002 Djambatan: Jakarta
- Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ma'fahim Asasiyyah fi al-buruk al-Islamiyyah* 1996, Al-Ma'had Al'alamy Lil Fikri Al-Islamy: Kairo
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 2002, Rineka Cipta: Jakarta
- Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, 2000, Diponegoro, Bandung.
- Hasibuan Malayu, *Perbankan Islam*, 2002, PT Bumi Aksara: Jakarta
- Muhammad firdaus, *Sistim dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, 2005, Renaisan: Jakarta
- Radiosunu, *Manajemen Pemasaran Suatu Pendekatan Analisis*, 1986, BPFE: Yogyakarta
- Ruslan Rosadi, *Management Public Relations*, 2006, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Usman, Husaini dan Akbar ,S Purnomo, *Metodelogi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua, 2008, PT Bumi Aksara: Jakarta